

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, E. N., Isnaini, I., & Sukamti, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian Kota Malang. *Technomedia Journal (TMJ)*, 58-72.
- Al Ghozali, S. M. (2019). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- Ardiyanti, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Baltagi. (2005). *Econometrics Analysis of Panel Data*. England.
- Bungkaes, H. R., Kiyai, B., & Posumah. (2013). Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Journal Acta Diurna*, 1-23.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 149-163.
- Dewi, S. S. (2021). Analisis Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Wilayah di Kabupaten Klaten.
- Eko, S. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Ferizaldi. (2016). *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*. Aceh: UNIMAL PRESS.
- Gujarati, D. (2003). *Basic Econometric*. New York: McGraw Hill.
- Gujarati, D., & Porter. (2008). *Basic Econometrics*. New York: McGraw-Hill Education.
- Hamidi, H., Setijonegoro, F. N., Fujitriartanto, Sa'id, A., Harioso, Huda, . . . Mu'arofah, A. F. (2015). *Indeks Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- Hendrarso, P., Handoko, P., Ramdhani, M. F., Andayani, N., & Tania, R. (2021). Kajian Pengentasan Desa Tertinggal Melalui Pendekatan Indeks Desa Membangun. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 57-69.
- Imron, A. (2012). Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim. *Jurnal Riptek*, 6(1), 2.
- Jalal, F. (1997). Peningkatan Kualias SDM Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Daerah.
- Kaloh, D. (2002). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global*. Jakarta: PT. RNINEKA CIPTA.
- Keuangan, M. (2017). *Buku Pintar Dana Desa ( Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kharisma, B. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 101-119.
- Koswara. (2000). Makna Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Kumorotomo, W. (2008). *Desentralisasi Fiskal : Politik dan Perubahan Kebijakan, 1974-2004*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kurniawan, B. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Mucharomah, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017 (Studi Empiris Desa-Desa di Kabupaten Wonogiri).
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. *Jurnal El-Riyasah*, 67-83.
- Nurhayati, Siti Fatimah (2001). Permasalahan dan Konsekuensi Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Papalia, E. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Desa Waimangit Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- Partini. (2018). evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

- Priyono, & Ismail, Z. (2012). *Teori Ekonomi*. Surabaya: Dharma Ilmu.
- Purnomo, J. (2016). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest Yogyakarta.
- Richardson, H. W. (1991). *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sambanis, N., & Milanovic, B. (2014). Explaining Regional Autonomy Differences in Decentralized Countries. *Comparative Political Studies*, 47(13), 1830-1855.
- Sari, N., & Oktavianor, T. (2020). Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Barito Kuala. *JPP: Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 35-41.
- Setyobakti, M. H. (2017). Identifikasi Masalah dan Potensi Desa Berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, 1-14.
- Sidik, M. (2002). *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*. Yogyakarta.
- Sinaga, M., Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). Peranan Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *PERSPEKTIF*, 46-49.
- Sirojuzilam. (2008). *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Siti, S., Astuti, E., & Ismiwati, B. (2020). Implementasi PERMENDESAPDTTRANS NO. 2 Tahun 2016 Terkait Status Desa di Desa Sukarara Lombok Tengah. *Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi*, 71-81.
- Soejito, I. (1981). *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma.
- Sufianto, D. (2020). Pasang Surut Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 271-288.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarno, M. (2020). Analisis Pengembangan Potensi Desa Berbasis Indeks Membangun Desa (IDM) (Studi Kasus: Desa Ponggok Kecamatan Palohharjo Kabupaten Klaten). *FMIPA UNIMUS*, 533-541.

- Sun'an, M., & Senuk, A. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sunu, M. K., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 843-872.
- Suroso. (2020). Kebijakan Pembangunan Desa Tertinggal . *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 47-62.
- Tambunan, B. H., Sihombing, M., & Harahap, H. (2020). Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. *PERSPEKTIF*, 439-446.
- Tarigan, R. (2004). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahhab. (2020, Oktober 19). *Apa itu Indeks Desa Membangun?* Retrieved from DPPKBPMMD Kabupaten Bantul: <https://dppkbpmmd.bantulkab.go.id/apa-itu-indeks-desa-membangun/>
- Wasistiono, S. (1999). *Sistem Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Bahan Kursus Reguler ke-23 Staf Umum dan Komando TNI-AD*. Bandung: SESKOAD.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia FE UII.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*. Jakarta: Ekonosia.
- Yuliaswati, N. N. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes), dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa .
- Yulitasari, & Tyas, W. P. (2020). Dana Desa dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 74-83.
- Yustisia. (2015). *Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visi Media.
- Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Presiden Republik Indonesia. Jakarta

Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta